



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Lamongan, Jawa Timur 62217
Telepon (0322) 316147, Faksimile (0322) 31617 Pos-el disnakerlamongankab@gmail.com
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 10 Maret 2026

Nomor : 000.8.6/ 88 /413.115/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindaklanjut Laporan Hasil
Evaluasi Manajemen Risiko Dinas
Tenaga Kerja Kab. Lamongan
Tahun 2025

Yth. Sdr. Inspektur
Kabupaten Lamongan
di
LAMONGAN

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 15 Januari 2026 Nomor : 700.1.2.1/6.7/LHP/413.060/2026 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Bersama ini disampaikan dengan hormat, terhadap hasil evaluasi, sudah kami tindaklanjuti rekomendasi dimaksud yaitu dengan :

1. Menuangkan kegiatan pengendalian yang baru dalam Rencana Tindak Pengendalian di Register Risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2026;
2. Menyusun indikator output kegiatan pengendalian dalam Rencana Tindak Pengendalian di Register Risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2026.

Bukti dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**


M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730707 199303 1 010

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

Nama Unit Kerja	:	Dinas Tenaga Kerja
Tahun Penilaian	:	2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
Indikator Kinerja Tujuan	:	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja													
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Presentase Penduduk yang Bekerja	Terbatas nya kesempatan kerja	Angkatan Kerja Baru tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar	RSO.26.07.115.01	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Ketidak sesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Eksternal	C	Pengangguran meningkat	DISNAKER dan Angkatan Kerja	1. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan Ketrampilan/Kompetensi Angkatan Kerja 2. Penyebaran info lowongan melalui media sosial 3. Pengoperasian aplikasi sistem informasi pasar kerja 4. Link and match dengan SMK dalam Bursa Kerja Khusus (BKK)	Perubahan kondisi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terduga	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Pelatihan berbasis kompetensi (jumlah peserta pelatihan), Koordinasi Daerah Vokasi (terlaksananya koordinasi), Memfasilitasi lulusan sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (Terlaksananya job fair dengan BKK).
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Akuntabilitas kinerja internal rendah		RSO.26.07.115.02	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Internal	C	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi	DISNAKER dan Pemerintah Kabupaten	1).Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang; 2).Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai.	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Melaksanakan evaluasi kinerja tiap bulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang (Tersedianya Laporan evaluasi Kinerja Tribulan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja													
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kualitas pelayanan kurang optimal		RSO.26.07.115.03	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Implementasi pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat	Internal	C	Tingkat kepuasan masyarakat rendah	DISNAKER dan Pemerintah Kabupaten	Maklumat Pelayanan, penyediaan kotak saran, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, dan survei kepuasan manual.	Survei tahunan seringkali tidak menggambarkan kondisi real-time; kotak saran jarang diisi, Pengolahan data lambat dan seringkali responden mengisi secara tidak objektif karena tidak terburu-buru.	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Digitalisasi Survei Kepuasan Masyarakat berbasis QR Code (Tersedianya stiker/standing banner QR Code di setiap loket)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Nilai Manajemen Risiko	Target kegiatan tidak tercapai		RSO.26.07.115.04	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Penyusunan Register risiko kurang sesuai	Internal	C	Nilai MR rendah	DISNAKER dan Pemerintah Kabupaten	Penyusunan dokumen Risk Register (Daftar Risiko) tahunan dan laporan monitoring triwulanan (aplikasi SIMARIO)	Monitoring Risiko seringkali hanya dianggap beban administrasi	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Sosialisasi budaya risiko bagi seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Terlaksananya sosialisasi), Implementasi Monitoring Evaluasi RTP (Dokumen Laporan Realisasi RTP)

Nama Unit Kerja	:	Dinas Tenaga Kerja
Tahun Penilaian	:	2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
Indikator Kinerja Tujuan	:	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Sasaran	:	Presentase Penduduk yang Bekerja

Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
Risiko operasional OPD Dinas Tenaga Kerja														
Subkegiatan: Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Persiapan Pelatihan/ Fasilitasi	Operasional : Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro		ROO.2 6.07.11 5.01	Kabid Penempatan Tenaga Kerja	Kurangnya tenaga instruktur/ahli di Disnaker untuk melatih SDM perusahaan	Internal	C	Data mikro perusahaan tidak tersedia	Perusahaan & Dinas	Penyelenggaraan Bimtek/Workshop setahun sekali	Bimtek tidak berkelanjutan (hanya sekali jalan) tanpa pendampingan pasca-pelatihan	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Layanan asistensi bagi perusahaan (Terlaksananya sesi asistensi bagi 25 SDM/tahun)
Subkegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Pelaksanaan	Risiko Operasional : Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi		ROO.2 6.07.11 5.02	Kabid Pelatihan Kerja	Terbatasnya Anggaran Pelaksanaan Uji Kompetensi	Internal & Eksternal	C	Lulusan BLK tidak semua di terima di dunia usaha dan dunia industri	Pencari Kerja & Dinas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan rutin sesuai kurikulum dan ujian internal BLK, Menyiapkan anggaran untuk alumni BLK mengikuti Uji Kompetensi BNSP	Belum ada kewajiban sertifikasi BNSP bagi seluruh peserta di akhir program (Masih minimnya alokasi anggaran untuk UJK, perlu penambahan anggaran) dan kurangnya link and match dengan kebutuhan industri terkini.	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Menambahkan tahap asesmen awal (pre-test) untuk menilai kesiapan peserta (terlaksananya pre-test) dan Integrasi Program Pelatihan & Sertifikasi (Terbitnya Sertifikat Kompetensi BNSP bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan)

Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab			C/ UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena				
Risiko operasional OPD Dinas Tenaga Kerja															
Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	Pelaksanaan	Kemitraan: Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi		ROO.2 6.07.11 5.03	Kabid Pelatihan Kerja	Proses akreditasi membutuhkan banyak biaya	Internal & Eksternal	C	Lembaga yang terakreditasi sedikit dan Kualitas pelatihan swasta tidak terjamin	Peserta Kursus, LPK, DISNAKER	Sosialisasi regulasi akreditasi dan Pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja	Sosialisasi hanya bersifat administratif, Terkendala minimnya anggaran	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Melakukan bimbingan dan pendampingan terkait pentingnya akreditasi lembaga (Jumlah LPK Swasta terakreditasi bertambah)	
Kegiatan: Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat		Operasional : Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi.	Perusahaan kecil tidak menerapkan rekomendasi pasca-konsultasi.	ROO.2 6.07.11 5.04	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam mengimplementasikan alat, teknik, dan metode produktivitas yang telah disarankan	Eksternal	C	Target jumlah perusahaan yang meningkatkan produktivitasnya tidak tercapai;	Perusahaan	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan produktivitas	Monitoring pasca-konsultasi belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga sulit memastikan metode produktivitas diterapkan secara konsisten	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Pembentukan grup konsultasi berkelanjutan (mentoring digital) (Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring Pasca-Konsultasi)	
Subkegiatan: Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Pelaksanaan	Operasional : Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK		ROO.2 6.07.11 5.05	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Kurangnya validasi antara kualifikasi lulusan dengan spesifikasi lowongan yang dibuka oleh perusahaan mitra	Internal & Eksternal	C	Meningkatnya angka pengangguran lulusan baru (fresh graduate)	lulusan baru (fresh graduate)	Melaksanakan koordinasi dengan pengelola BKK SMK dan memfasilitasi pelaksanaan Job Fair secara rutin	Belum ada pemetaan kompetensi siswa sebelum Job Fair dan monitoring pasca-acara (apakah pelamar benar-benar dipanggil/diterima) masih lemah	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Pelaporan hasil seleksi dari perusahaan kepada BKK dalam jangka waktu tertentu (Tersedianya database hasil penempatan tenaga kerja per masing-masing SMK yang menyelenggarakan Job Fair)	

Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena				
Risiko operasional OPD Dinas Tenaga Kerja															
Kegiatan: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	Pelaksanaan	Kemitraan: Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal		ROO.2 6.07.11 5.06	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Minimnya sosialisasi terkait prosedur keberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Internal - Eksternal	C	PMI Ilegal meningkat	PMI & Pemerintah	1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan ke PMI ilegal serta kerjasama dengan Pemerintah Desa 2. Koordinasi dengan P3MI untuk kelengkapan persyaratan CPMI 3. Penerapan dalam sistem SIAPKerja	Jangkauan sosialisasi belum merata, Banyak calo CPMI yang menjanjikan dan gaji tinggi	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : 1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI ilegal (Terlaksananya koordinasi) 2. Koordinasi dg Direktorat PTKLN (Terlaksananya koordinasi)	
Subkegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	Rendahnya kepatuhan perusahaan dalam membuat peraturan dan syarat kerja	ROO.2 6.07.11 5.07	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kurangnya pemahaman manajemen perusahaan terhadap regulasi terbaru dan kurangnya pengawasan	Eksternal	C	Munculnya perselisihan hubungan industrial dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar pekerja	Pekerja/Buruh dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi regulasi secara berkala melalui surat edaran, Pelayanan verifikasi draf peraturan perusahaan	Sosialisasi pasif (surat) sering tidak dibaca atau tidak sampai ke pembuat kebijakan di perusahaan	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Jemput bola (asistensi langsung) dan penyediaan layanan konsultasi penyusunan PP/PKB (jumlah SK Pengesahan PP dan Nomor Pendaftaran PKB yang diterbitkan)	

Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena				
Risiko operasional OPD Dinas Tenaga Kerja															
Subkegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan : Pembayaran BPJS terlambat	Terhambatnya hak jaminan sosial bagi tenaga kerja akibat keterlambatan iuran	ROO.2 6.07.11 5.08	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kendala administrasi dalam pencairan dana DBHCHT	Internal/ Eksternal	C	Petani dan nelayan tidak terlindungi	Peserta BPJS	Penganggaran iuran dalam DBHCHT dan Penjadwalan pembayaran iuran rutin	Data nelayan dan petani sangat dinamis (pindah profesi/meninggal) sehingga validasi sering melampaui batas tanggal tagihan (invoice) BPJS	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Koordinasi percepatan DBHCHT	
Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	Pelaksanaan	Kemitraan : Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas	Minat transmigrasi tinggi namun kuota dipangkas namun kuota dari pusat sangat minim	ROO.2 6.07.11 5.09	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggaran pusat terbatas	Eksternal	C	Penundaan pemberangkatan calon transmigrasi	Calon Transmigran	Pendaftaran calon transmigran secara manual, Koordinasi dengan kementerian transmigrasi terkait pembaruan kuota	Informasi kuota sering terlambat diterima daerah, Belum ada kriteria prioritas yang transparan	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Koordinasi intensif dengan Kementerian terkait penambahan kuota khusus daerah (Surat usulan penambahan kuota dan berita acara koordinasi)	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan	Risiko Fraud : Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal	Oknum membuat Laporan secara formalitas/asal-asalan di akhir tenggat waktu demi mengejar target administratif	ROO.2 6.07.11 5.10	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi	Kurangnya pemahaman antar Pihak bidang terhadap perencanaan, penganggaran serta monev pelaksanaan kinerja dan anggaran program/kegiatan	Internal dan Eksternal		Keterlambatan pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan, menghambat penyusunan LKPJ Kepala Daerah	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat	Pengingat via grup pesan singkat, Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang	Belum adanya sanksi tegas bagi keterlambatan input, Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Koordinasi dan kerja sama kepada pihak terkait mengenai data yang dibutuhkan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya (Tersedianya dokumen hasil koordinasi data dan laporan evaluasi kinerja)	

Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
Risiko operasional OPD Dinas Tenaga Kerja														
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Operasional : Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline)		ROO.2 6.07.11 5.11	Kasubbag Keuangan	Sistem informasi akuntansi (SIPD/SIMDA) mengalami kendala teknis atau downtime di akhir periode.	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan proses pencairan anggaran tahap berikutnya dan ketidaksinkronan data keuangan	Seluruh Unit Kerja Dinas	Rekonsiliasi Internal wajib antara Bendahara Pengeluaran dengan PPTK (terlaksananya rekonsiliasi internal)	Belum ada sistem kendali (checklist) digital yang memantau kelengkapan berkas	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Menetapkan deadline internal (misal: tanggal 5 setiap bulan) sebelum batas waktu resmi untuk memberikan ruang koreksi. Mewajibkan koordinasi antara bagian aset, bagian program, dan bendahara setiap bulan sebelum laporan final dicetak (Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Lembar Kendali Dokumen)
Subkegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Pelaksanaan	Fraud: Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu	Spesifikasi dalam dokumen lelang diarahkan pada satu penyedia tertentu	ROO.2 6.07.11 5.12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Intervensi pihak luar atau keinginan untuk memenangkan rekanan lama	Internal dan Eksternal	C	Proses tidak transparan	Dinas Tenaga Kerja	Penggunaan aplikasi E-Katalog Konstruksi atau Lelang Elektronik (LPSE).	Lemahnya pengawasan dalam tindakan gratifikasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa	Kegiatan pengendalian dan indikatornya : Menggencarkan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap anti korupsi dan gratifikasi (terlaksananya sosialisasi) serta Review Spesifikasi oleh Tim (Berita Acara Review Spesifikasi Teknis)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN LAMONGAN

M. ZAMRONI, S.Sos, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730707 199303 1 010